

AHMAD SALEHUDIN

ABDURRAHMAN WAHID

Keislaman, Kemanusiaan,
dan Kebangsaan



AHMAD SALEHUDIN

ABDURRAHMAN
WAHID



ABDURRAHMAN WAHID

Penulis: Ahmad Salehudin
Editor: Latief S. Nugraha
Pemeriksa Aksara: Daruz Armedian
Tata Sampul: Mita Idriani Suwardi
Tata Isi: Vitrya
Pracetak: Kiki

Cetakan Pertama, April 2019

Penerbit
BASABASI
Jl. Malabar No. 16, Sorowajan Baru,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Telp: (0274) 484360
HP: 087808058023 dan 081316320671
Email: basabasistore@gmail.com
LINE: @zog5070k

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Salehudin, Ahmad

Abdurrahman Wahid/Ahmad Salehudin; editor, Latief S. Nugraha--cet. 1--
Yogyakarta: BASABASI, 2019

184 hlmt; 14 x 20 cm
ISBN 978-602-5783-95-1

I. Sosial Politik
II. Latief S. Nugraha

I. Judul

PROLOG

*What we see is shaped by what we already know,
by other things we see, and by what we expect*
(William C. Placher)

U ngkapan Placher tersebut cukup memberikan pesan bahwa apa yang kita harapkan, lihat, dan ketahui akan menentukan posisi baik dalam berargumen ataupun menentukan sikap. Pengharapan merupakan energi positif yang menjadi *guide* dalam kehidupan setiap manusia, demikian juga dengan penulisan buku ini. Namun, karena pengharapan merupakan faktor yang paling dominan dalam membentuk, menentukan pilihan, dan merespons setiap fenomena maka pengetahuan, dengan sendirinya, senantiasa berada dalam ranah subjektif. Bahkan dalam dunia kampus yang selalu digembar-gemborkan menjadi *objective center*, kita juga akan menemukan nuansa-nuansa subjektif tersebut. Bisa saja seorang mahasiswa yang cerdas tapi selalu berbeda pendapat dengan dosen akan mendapat nilai jelek demikian juga sebaliknya, walaupun tidak terlalu pandai tapi mampu

"mengambil hati" dosen akan mendapatkan nilai bagus. Pun demikian dengan tulisan ini, tidak akan lepas dari nalar subjektif tersebut. Apalagi yang menjadi objek dari tulisan ini adalah seorang yang pemikiran sering menjadi berita karena pendapatnya yang anti-mainstream dari pandangan masyarakat pada umumnya.

Pemikiran, apalagi yang menyangkut persoalan-persoalan keagamaan, yang bertentangan dengan pendapat umum akan melahirkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sejarah membuktikan, tokoh-tokoh yang mempunyai penafsiran berbeda terhadap teks-teks keagamaan tidak jarang harus menghadapi amarah, ancaman pembunuhan, dan bahkan dikafir-kafirkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang merasa benar karena pemahaman yang berbeda. Syekh Siti Jenar harus rela mati karena berbeda pemahaman keagamaannya dengan Wali Sanga, Ulil Absar Abdalla harus rela menerima cap kafir karena mempunyai pandangan yang dianggap liberal, dan masih banyak lagi kasus yang menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap agama selalu melahirkan konsekuensi-konsekuensi mengerikan. Bahkan tidak jarang, kelompok-kelompok yang berseberangan menggunakan tangan-tangan negara untuk membenarkan tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan, lihat misalnya kasus yang menimpa kelompok Ahmadiyah di Mataram, salat dua bahasa di Malang, dan sebagainya. Padahal jika ditelusuri secara cermat penggunaan tangan-

tangan kekuasaan untuk membelenggu kelompok-kelompok yang berbeda hanya akan mereduksi keluwesan nilai-nilai keberagamaan.

Apakah karena berbeda, kemudian salah? Ataukah salah karena berbeda? Perbedaan adalah Rahmat dan juga media untuk selalu mengoreksi pemahaman, jika perbedaan tersebut disikapi secara dewasa. Namun jika tidak, perbedaan akan menjadi sumber bencana. Bukankah pemikiran dan sikap keberagamaan yang termanifestasikan dalam ritualitas merupakan respons terhadap apa yang dipahami sebagai Dzat Yang Serba Maha, *ultimate reality*. Perbedaan pemahaman terhadap konsep Sang Khalik merupakan sebab dari timbulnya beragam pemikiran keagamaan. Hanya saja perlu dipahami bahwa apa pun dan bagaimanapun bentuk dari pemikiran keagamaan tersebut, kita harus menyadari bahwa pemikiran keagamaan kita berada dalam ranah subjektif, bisa benar dan juga bisa salah. Bagi penulis, pemahaman keislaman dapat dianggap benar jika pemahaman tersebut mendukung terangkatnya derajat kemanusiaan.

Munculnya gerakan-gerakan keislaman baru (*new Islamic movements*) dengan orientasi terbentuknya Negara Islam tidak jarang menggunakan cara-cara biadab, misalnya bom bunuh diri, harus kita waspadai keberadaannya. Gerakan-gerakan yang dengan bangga memproklamirkan diri sebagai garda depan Islam cukup mengkhawatirkan, setidaknya tidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskannya. *Pertama*, upaya

untuk mengabsolutkan pemahamannya terhadap teks-teks keagamaan (al-Quran, Hadis dan Sunnah) dan menolak pemahaman yang berbeda, seyogianya telah mereduksi nilai universalitas Islam dan membelenggu keutamaan manusia yang paling hakiki, yaitu kemampuan berpikir. *Kedua*, dalam konteks berbangsa dan bernegara, seperti Indonesia dengan beragam agama dan budayanya, upaya mendirikan Negara Islam, demikian juga dengan pendirian negara agama lainnya, jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak bijaksana karena hanya akan membawa bangsa ini ke jurang kehancuran. Jargon-jargon yang sering dilontarkan bahwa Negara Islam merupakan solusi terhadap berbagai krisis merupakan sikap yang tidak mau belajar dari sejarah. Sejarah membuktikan bahwa sebuah negara yang berubah menjadi Negara Islam terus menerus dihiasi cerita-cerita kekerasan, dan jika ditanyakan siapa yang beruntung dengan terbentuknya Negara Islam? Jawabannya adalah militer, agamawan, dan para politisi. Kekalahan partai-partai Islam di Indonesia yang mengusung Islam sebagai ideologinya dari partai-partai yang berasaskan kebangsaan merupakan bentuk nyata "ketidakinginan" masyarakat Indonesia terhadap Negara Islam.

Ketiga, syariat Islam memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh individu-individu yang mengaku Islam. Hanya saja penerapannya harus didasarkan kepada sikap suka rela bukan dengan meminjam tangan-tangan negara untuk memaksakan pelaksanaannya. Jika ini terjadi

maka Islam akan menjadi alat propagandis kekuasaan sehingga akan menghilangkan kesakralannya. Kekuasaan harus menjamin kebebasan setiap individu untuk mendukung, berkeberatan, dan memodifikasi setiap penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Jika kekuasaan tidak bersikap netral terhadap berbagai perbedaan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan, tidak mustahil agama akan menjadi alas kaki para penguasa. Efek lebih jauh dari sikap ini adalah munculnya kelompok-kelompok ekstrem agama dalam negara sehingga dapat memicu timbulnya konflik, *intra-religious* dan *inter-religious conflict*.

Jika kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang bertujuan membawa manusia untuk ber-islam maka tentunya tindakan-tindakan kekerasan yang digunakan untuk memperjuangkan tegaknya masyarakat yang ber-islam adalah omong kosong. Ber-islam, menurut hemat penulis, adalah sikap patuh atau tunduk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendapat ini tentunya berbeda dengan pendapat Nurcholish Madjid yang memaknai Islam sebagai sikap pasrah kepada Allah Swt. Pasrah dan tunduk adalah sikap yang berbeda. Pasrah merupakan sikap ketidakberdayaan yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk melakukan penyikapan. Sedangkan patuh merupakan sikap yang senantiasa bersedia untuk menjalankan perintah Tuhan. Dalam konteks ini, misalnya, untuk menggambarkan ketaatan malaikat untuk senantiasa menjalankan perintah Tuhan digunakan kata

merupakan cara yang paling efektif. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa betapa pun hebatnya perlawanan yang dikobarkan para pejuang untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan. "Persoalan" baru selesai ketika para pemimpin bangsa ini duduk bersama dan berdialog dengan para penjajah.

Perbedaan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan merupakan *sunnatullah*. Manusia dengan kemampuan berpikirnya mampu menilai baik dan buruk, manfaat dan mubazir, serta orientasinya untuk senantiasa memenuhi kebutuhan egonya merupakan penyebab dari munculnya perbedaan demi perbedaan pemahaman yang ada. Sementara itu, Allah telah berkehendak bahwa manusia diciptakan secara berbeda-beda. Oleh karena itu, barang siapa menginginkan terbentuknya suatu umat yang seragam dengan pemahaman tunggal dan menolak perbedaan, juga terhadap pemahaman teks-teks keagamaan, secara mudah dapat kita katakan bahwa semangat mereka melebihi semangat Tuhan. Harus disadari juga bahwa persepsi terhadap Tuhan dan kebenaran dipengaruhi oleh cara pandang dan tujuan itu sendiri. Kelompok yang menganggap bahwa Islam mempunyai konsep-konsep kenegaraan akan berusaha untuk mencari landasan justifikasi terhadap pemikirannya, demikian juga sebaliknya. Dalam posisi ini, akan timbul nalar subjektif dengan mengutip hal-hal yang memperkuat justifikasi

dan menolak (baca: mengesampingkan) bagian yang tidak mendukungnya. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh apabila timbul perbedaan pendapat dalam menyikapi fenomena sosial dengan sama-sama menggunakan teks-teks keagamaan. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi dalam Islam saja tetapi juga dalam semua agama, tidak hanya di Indonesia saja tetapi di seluruh negara walaupun negara itu dikategorikan sebagai negara maju.

Beragam pemahaman keagamaan menyebabkan munculnya ekspresi keberagamaan yang berbeda pula, baik dalam bentuk persepsinya terhadap realitas mutlak (*ultimate reality*) maupun dalam ranah sosial keagamaannya. Menurut ajaran Islam, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dan orangtua, serta lingkungannya, yang akan membentuknya, mau jadi apa bayi yang baru lahir tersebut. Sehingga tidak mengherankan apabila muncul anggapan; kalau orangtuanya beragama Islam maka si bayi akan menjadi orang Islam, demikian juga jika orangtuanya beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Pada posisi ini, keberagamaan seseorang tampaknya dipandang sebagai hasil dari proses konstruksi sosial masyarakatnya. Nilai dan tradisi, juga agama, dilembagakan dan diwariskan maka jadilah individu tersebut sebagai cerminan dari masyarakatnya.

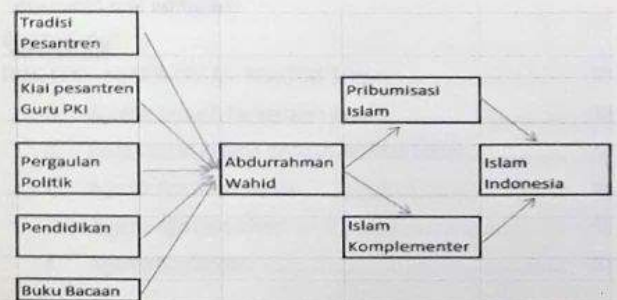
Perkembangan keagamaan seseorang akan dipengaruhi oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal, di tempat belajar, dan di tempat kerja dengan fenomena sosial yang

hadir silih berganti dengan beragam penyikapannya. Nilai-nilai agama akan diperoleh pertama kali dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Sementara pengembangan lebih mendalam akan diperoleh melalui hubungan-hubungan yang terjadi dalam komunitas keagamaan di lingkungan tempat tinggal. Sikap keagamaan ini akan diuji dan dimatangkan ketika di kemudian hari bertemu dengan para penganut agama yang berbeda atau walaupun seagama tetapi mempunyai pandangan yang berbeda serta peristiwa-peristiwa sosial yang hadir dalam kehidupan. Dengan memahami proses konstruksi sosial keagamaan, maka setiap orang akan mengetahui mengapa seseorang mempunyai pemahaman dan sikap keagamaan yang berbeda dengan diri orang lain.

Bagi orang-orang yang beragama, segala tindakannya merupakan ekspresi keberagamaannya. Yang dipikirkan dan dilakukan merupakan manifestasi dari pemahaman keagamaannya. Dengan menggunakan asumsi bahwa pemahaman keagamaan orang yang beragama akan mempengaruhi pemikiran dan tindakannya, buku ini mengkaji pemikiran keislaman K.H. Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur. Abdurrahman Wahid, lahir dari pusaran inti Nahdlatul Ulama (NU), tumbuh besar dalam masyarakat kosmopolitan, tradisional, modern, dan liberal dalam tradisi agama. Perjalanan tersebut pada gilirannya mengkristal dan menghasilkan pemikiran dan pemahaman "agama" yang

unik, berlawanan dengan arus besar pemikiran masyarakat Indonesia pada umumnya namun tetap khas berlandaskan pada *aras* dasar pemikiran tradisonalisme Islam.

Dalam buku ini, ada tiga hal yang cukup menarik dan menjadi titik pijak Abdurrahman Wahid dalam berislam, yaitu Islam untuk kemanusiaan, pribumisasi Islam, dan Islam sebagai komplementer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Abdurrahman Wahid juga menyadarkan kita tentang dua hal. *Pertama*, sikap berislam tidak semata-mata dipengaruhi oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti budaya, pendidikan, *world views*, dan kepentingan. *Kedua*, berangkat dari kesadaran pertama tersebut, sangat jelas bahwa agama paralel dengan ilmu agama. Seperti apa ilmu agama yang kita miliki, seperti itu juga wajah agama kita.



Terbitnya buku ini semakin menambah hutang budi penulis kepada almarhum ayahanda Muljasit dan almarhumah ibunda Hadima serta *simbah* Sadrina. Semoga buku ini menjadi amal jariyah untuk beliau. Kesabaran istriku, Bety Sulistyowati dan senyum anak-anakku, Alisha Haura Afiqoh (kak Ica), Athalia Humaira Pramudawardhani (Maira), dan Anindya Tribuwana Fredella (Dya) merupakan sumber spirit yang terus mengalir.

Akhirnya, dengan rendah hati, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan buku ini terbit, khususnya Mas Muwafiqul. Terima kasih juga kepada Mas Reza Nufa dari Penerbit Basabasi yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Tanpa bantuannya, mungkin buku ini belum hadir di hadapan pembaca budiman.

Wallahua'lam bissawab.

Kalitirto

DAFTAR ISI

PROLOG.....	3
Bagian Pertama	
DINAMIKA KEBERAGAMAAN: AKOMODASI DAN KONTESTASI	17
Ragam Peran Agama	23
Konstruksi Keberagamaan	31
Abdurrahman Wahid: Sebuah Fenomena	33
Bagian Kedua	
EKSISTENSI AGAMA DALAM REALITAS SOSIAL	37
A. Agama: Sebuah Perkenalan Awal	38
B. Pergumulan Agama dengan Realitas Sosial.....	44
C. Agama dan Kebudayaan	46
D. Agama dan Demokrasi	53
E. Agama dan Negara	61

Bagian Ketiga

BIOGRAFI PEMIKIRAN KEISLAMAN ABDURRAHMAN WAHID.....	69
A. Abdurrahman Wahid: Sebuah Perkenalan Awal.....	70
B. Abdurrahman Wahid: Menapak Jalur Kultural dan Struktural	79
C. Paradigma Keberagamaan: Pribumisasi dan Islam sebagai Komplementer	85

Bagian Keempat

PEMIKIRAN KEISLAMAN ABDURRAHMAN WAHID.....	101
A. Kontroversi Pemikiran Keislaman Abdurrahman Wahid	102
B. Dimensi-Dimensi Pemikiran Keislaman Abdurrahman Wahid.....	118
C. Posisi Pemikiran dan Perjuangan Abdurrahman Wahid	148

Bagian Kelima

PENUTUP

ABDURRAHMAN WAHID DAN ISLAM INDONESIA	159
DAFTAR PUSTAKA	165
TENTANG PENULIS.....	181
INDEKS	183

Bagian Pertama

DINAMIKA KEBERAGAMAAN:
AKOMODASI DAN KONTESTASI

Agama sangat berpengaruh terhadap sejarah kemanusiaan, yaitu dalam membentuk dan menentukan corak, polarisasi peran-peran, dan pelapisan sosial dalam masyarakat. Meskipun demikian, perdebatan pendapat bahwa agama yang membentuk masyarakat atautkah masyarakat yang membentuk agama sampai sekarang tidak pernah menemukan titik temu. Agamawan secara umum memandang bahwa nilai-nilai agama membentuk masyarakat, sedangkan pada sisi yang lain, para *scientist* memandang bahwa agama pada hakikatnya adalah bagian dari budaya masyarakat. Terlepas dari perdebatan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa agama berpengaruh besar terhadap masyarakat. Tradisi berjilbab yang semakin marak, konsep khilafah dalam Islam atau kerajaan Allah dalam Kristen,

sistem ekonomi Islam yang saat ini sedang *booming*, dan bahkan perang salib (perang antara Islam dan Kristen) di masa lalu jika ditelusuri merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai agama. Menurut Joachim Wach (1996: xxxv-xxxvi), pengaruh agama terhadap masyarakat ada dua. *Pertama*, pengaruh agama terhadap bentuk dan sifat organisasi-organisasi, hubungan-hubungan, dan bentuk-bentuk sosial. *Kedua*, pengaruh agama terhadap agama seperti yang terlihat dalam pembentukan, pengembangan, dan penentuan kelompok-kelompok spesifik baru.

Agama merupakan salah satu referensi utama para pemeluknya dalam bertindak, menyikapi, merespons kondisi sekitarnya, dan memberikan makna atas tindakannya. Tentu saja penggunaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi subjektif masing-masing pemeluk agama. Mereka yang mampu mengakses teks-teks keagamaan secara luas dan mendalam, tentu akan berbeda dalam mengekspresikan agamanya dengan mereka yang memiliki keterbatasan. Mereka yang dibesarkan dalam latar sosial budaya dan politik yang stabil, tentu saja akan memiliki cara beragama yang berbeda dengan mereka yang hidup dalam *setting* sosial budaya dan politik yang tidak stabil. Dengan kata lain, wajah agama akan cenderung berubah tergantung latar sosial budaya dan ekonomi politik para penganutnya.

Ketika Clifford Geertz mendatangi Mojokuto (Pare, Kediri Jawa Timur) pada tahun 1950an, dia menjumpai Islam yang tidak tunggal, tapi hadir dengan tampilan tiga wajah yang kemudian dia klasifikasikan menjadi santri, abangan, dan priyayi (Geertz, 1960). Walaupun banyak yang mengkritik klasifikasi tersebut, apa yang disampaikan Geertz tersebut mengonfirmasi bahwa agama—Islam—cenderung memiliki banyak wajah. Keragaman tersebut akan semakin terkonfirmasi jika kita meluangkan waktu untuk mendatangi daerah-daerah di Indonesia. Kita akan menemukan praktik-praktik keislaman yang berbeda-beda di hampir setiap daerah. Secara generik, untuk menikah di dalam Islam cukup sederhana, yaitu ada mempelai, ada wali (bagi perempuan), ada saksi, akad, dan mahar. Semua itu tidak sulit dan tidak mahal. Namun, akan menjadi sangat berbeda ketika hadir dalam ruang sosial budaya dan ekonomi politik. Pernikahan akan mengalami differensiasi. Tradisi pernikahan di setiap daerah berbeda-beda: mungkin saja ada—secara generik—yang mirip, namun tidak sedikit pula perbedaannya. Tentang mahar misalnya, antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Ada yang sudah dianggap cukup dengan memberikan seperangkat alat salat, namun di daerah lain mahar menjadi sangat mahal, seperti di daerah Lombok yang harus menyediakan sekian puluh ekor kerbau, di daerah Batak bisa sampai ratusan juta, dan

di daerah-daerah lain kita akan menemukan yang berbeda-beda. Islamnya tunggal, namun akan melahirkan keragaman ketika dibaca dan dipahami oleh para tokoh dan pembaca agama yang berlainan. Ada pengaruh timbal balik antara agama dan manusia, yaitu dalam satu sisi agama membentuk kemanusiaan dan pada sisi yang lain, manusia membentuk wajah agama.

Munculnya beragam aliran dalam Islam, misalnya, menunjukkan adanya beragam tafsir dan penyikapan terhadap ajaran-ajaran Islam. Jika ditelusuri, munculnya beragam aliran dalam Islam bermula dari persoalan politik yang dimulai pada perang *siffin*, perang antara pasukan Ali dan Muawiyah. Perang yang sarat nuansa politiknya tersebut merembet menjadi pertentangan teologis dan melahirkan beragam aliran keagamaan. Setiap kelompok menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar sedangkan yang lain salah, bahkan kafir.

Secara politis dan sosiologis, konsep kafir sebenarnya hanya menunjuk kepada orang-orang yang tidak sepaham (ingkar atau berbeda) dengan konsekuensi berada dalam satu barisan atau berada di luar barisan. Namun konsep kafir menjadi sangat menakutkan ketika mengalami proses sakralisasi dan ideologisasi. Kata kafir seolah-olah memberi justifikasi kepada sekelompok orang untuk melakukan apa saja—termasuk dibunuh—kepada mereka yang dianggap kafir. Terlepas dari pertentangan yang kemudian

melahirkan beragam aliran Islam tersebut, ada satu hal yang layak dicatat, yaitu fenomena sakralisasi gerakan politik dengan menggunakan diktum-diktum keagamaan menunjukkan bahwa agama dapat dipahami dan digunakan untuk kepentingan apa saja, termasuk untuk memberikan legitimasi terhadap kepentingan para penganutnya.

Pada ranah yang berbeda, munculnya mazhab-mazhab dalam fikih (*fiqh*) menunjukkan adanya perbedaan dalam menginterpretasikan dan memahami teks-teks keagamaan. Artinya, ada banyak faktor yang menyebabkan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan menjadi berbeda-beda. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada agama Islam, tetapi juga pada semua agama. Di dalam Kristen, misalnya, kita menemukan bahwa pemahaman yang berbeda terhadap teks-teks keagamaan telah melahirkan bermacam ragam gereja. Fenomena ini dapat pula dijumpai pada agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan sebagainya. Pada proses ini, peran kaum elit agama (agamawan) sangat menentukan. Para pemuka agama dengan otoritas keagamaan yang dimiliki mempunyai hak merekonstruksi wajah agama sedangkan para umat, orang awam, menjadi konsumennya. Sosiolog Max Weber mengatakan bahwa pemimpin bukan saja berdiri sebagai panutan masyarakat, namun juga merupakan tokoh yang mempunyai peran menentukan dalam perkembangan suatu bangsa. Lewat penampakan pemimpin keberadaan masyarakat dibaca, selain itu, melalui tangan pemimpin

pula kondisi tetap (*status quo*) atau perubahan masyarakat akan terselenggara (*Kompas*, 28 November 2001). Perubahan pada sejumlah negara menunjukkan, bahwa sebuah negara mau melakukan perubahan atau tidak tergantung pada pemimpinnya, seperti perubahan di Turki yang dikomandani oleh Kemal Attartuk, India oleh Mahatma Gandhi, Mesir oleh Gamal Abdul Naseer, demikian juga yang terjadi di Indonesia ada Soekarno, Hatta, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, dan lain sebagainya.

Dengan memahami proses tersebut maka kita akan mampu memahami mengapa dalam kurun waktu tertentu pe-nampakan wajah agama mengalami perubahan. Berubahnya latar sosial dan kebutuhan masyarakat di mana agama itu ada memaksa para agamawan untuk senantiasa memberikan penafsiran keagamaan berdasarkan realitas masyarakat yang dinamis. Jika para agamawan bersikap tertutup dan enggan untuk membaca fenomena kekinian, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah agama yang pada awalnya diyakini sebagai agama yang benar, kemudian dianggap agama berhala, dan mungkin saja agama yang sekarang dianggap sebagai agama berhala suatu saat nanti diyakini sebagai agama yang benar. Agama selalu berada dalam proses menjadi dan upaya untuk meletakkan agama dalam wajah beku tidak boleh berubah hanya akan meletakkan agama dalam pusara kematian. Dalam kondisi ini, peran elit agama sangat menentukan.

Ragam Peran Agama

Munculnya beragam penafsiran keagamaan, oleh karena itu, perlu dipahami sebagai upaya untuk merevitalisasi peran agama pada satu sisi dan menemukan pesan paling benar yang tersimpan dalam ajaran agama. Merevitalisasi peran agama tentunya harus berlandaskan spirit hadirnya agama dalam konteks kemanusiaan karena bagaimanapun juga keberadaan agama merupakan upaya untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Jika hasil penafsiran dan pemahaman terhadap agama menyebabkan terciderainya nilai-nilai kemanusiaan, maka yang perlu dilakukan adalah memeriksa kembali hasil penafsiran dan pemahamannya terhadap teks-teks keagamaan.

Perbedaan cara menghayati dan kemampuan memahami agama melahirkan pengalaman keagamaan yang berbeda, menimbulkan isi pertanyaan dan cara bertanya yang berbeda sehingga menghasilkan jawaban terhadap persoalan yang *ultimate* juga berbeda (Ahmad, 1985: ix). Artinya, persepsi seseorang terhadap yang *ultimate* mengilhaminya dalam mengonstruksi bentuk-bentuk agama. Perbedaan pengalaman keagamaan dalam menangkap yang *ultimate* dapat dilihat pada pemikiran, perbuatan, dan organisasi keagamaannya (Wach, 1996: 89-216). Hocking, sebagaimana dikutip Joachim Wach (1996: 90), mengungkapkan bahwa orang yang memperoleh pengalaman keagamaan yang

luas pasti akan menjadi seorang guru, atau kalau tidak demikian akan menjadi seorang pertapa atau seorang pengemis. Pengalaman keagamaan, akan membawanya pada sifat fundamentalis, inklusif, atau pluralis dalam beragama. Pilihan sikap fundamentalis, inklusif, atau pluralis merupakan hal yang lumrah dan "benar". Kita tidak bisa menyalahkan orang lain karena pilihannya itu tentu memiliki perspektif dan pertimbangan-pertimbangan dengan dasar yang rasional. Seperti penguatan kelompok fundamentalis Yahudi dengan argumen-argumen teologis yang diterjemahkan menjadi program politis, rasial, dan anti-Arab, menyebabkan kelompok-kelompok Islam merespons dengan mengobarkan radikalisme (Basyaib, 1999: 361).

Tentu saja pengalaman keagamaan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan politik. Dengan menggunakan pemahaman ini, maka kita akan mampu memahami mengapa seseorang rela melakukan bom bunuh diri dan mengapa mereka mau melakukan pengorbanan nyawa. Jawaban sederhananya adalah karena dalam tindakan mereka dilandasi oleh spirit keagamaan. Memahami tindakan mereka bukan berarti membenarkan tindakan yang dilakukan, karena pemahaman dan sikap membenaran berada pada sisi yang berbeda. Sikap yang ditunjukkan oleh para aktor bom Bali, misalnya, merupakan bahan untuk merenung yang sangat berharga. Tindakan mereka melakukan bom bunuh diri sehingga menyebabkan ratusan nyawa melayang merupakan fakta

bahwa ekstasi keberagamaan demi mendapatkan rida Tuhan telah mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang oleh sebagian orang dianggap tidak berperikemanusiaan. Di samping itu, fenomena bom bunuh diri menunjukkan kenyataan bahwa konsep benar-salah merupakan sesuatu yang relatif, bukan harga mutlak. Pada satu sisi pelaku bom bunuh diri dianggap teroris artinya perbuatan salah sedangkan pada sisi yang lain mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah upaya-upaya untuk melawan terorisme dunia.

Pengalaman keagamaan dipengaruhi oleh faktor *intern* (pengalaman subjektif) dan *extern* (seperti: ekonomi, politik, sosial, budaya, dll.). Artinya terdapat pengaruh timbal balik antara sikap dan kondisi sosial masyarakat—meminjam teorinya Peter L. Berger (1991), objektifikasi berkaitan dengan proses eksternalisasi dan internalisasi. Setiap orang melakukan eksternalisasi (mengeluarkan nilai-nilai), kemudian nilai-nilai itu akan bertemu dan berdialektika dengan nilai-nilai lain sehingga timbul objektivikasi nilai-nilai. Nilai-nilai yang telah terobjektivikasi kemudian diserap (diinternalisasi) oleh individu-individu menjadi landasan dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, pemahaman terhadap agama akan mengalami kontekstualisasi secara terus-menerus tanpa pernah berhenti. Melalui proses ini agama dibentuk dan ditransmisikan kepada para penerusnya. Fenomena tersebut, yang kemudian, mempengaruhi penam-

pakan agama dalam masyarakat. Menurut Ursula King, sebagaimana disampaikan Amin Abdullah (2000: 4), selain ciri dan sifat konvensionalnya yang mengasumsikan bahwa persoalan ketuhanan merupakan masalah terpokok dari agama, ternyata agama juga terkait erat dengan persoalan-persoalan historis kultural yang juga merupakan keniscayaan manusiawi. Dari studi empiris terhadap fenomena agama diperoleh pemahaman bahwa agama sesungguhnya sarat dengan berbagai kepentingan (*interest*) yang melekat dalam ajaran dan batang tubuh ilmu-ilmu keagamaan itu sendiri.

Jika pemahaman terhadap agama dibiarkan begitu saja tanpa ada proses kontekstualisasi terhadap lingkungannya, tidak mustahil agama akan menjadi barang kuno yang dianggap tak memiliki kegunaan. Agama yang pada awalnya hadir untuk memberikan solusi terhadap problem-problem kemanusiaan, akan tampil menjadi sumber masalah. Dewasa ini kita dapat menjumpai kelompok-kelompok keagamaan yang mempromosikan pemahaman keagamaan baru yang "cukup aneh". Tidak jarang hal tersebut berimbas pada hilangnya spirit penghargaan terhadap kemanusiaan dan menjadi sebab munculnya disintegrasi masyarakat. Agama tidak hadir untuk menjadikan manusia berubah status menjadi malaikat, tetapi agama hadir untuk mengembalikan derajat kemanusiaan. Islam, misalnya, hadir dalam masyarakat Arab selain tujuan formal untuk menauhkan masyarakat juga untuk menyelesaikan masalah-masalah

kemanusiaan yang saat itu mencengkeram bangsa Arab, seperti perbudakan, penghinaan terhadap perempuan, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika saat ini ada kelompok-kelompok keagamaan yang mempromosikan pemahaman atau melakukan tindakan-tindakan keagamaan yang memberangus nilai-nilai kemanusiaan maka kelompok itu telah lalai untuk menangkap nilai paling asasi dari agama.

Kalau kita mau bertanya sedikit saja mengapa dewasa ini muncul gerakan-gerakan keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan maka kita akan semakin sadar bahwa agama sering kali dijadikan "budak" kepentingan manusia. Analisis historis kultural menunjukkan bahwa timbunan kepentingan terhadap agama terkadang menyebabkan agama tercerabut dan bahkan lepas dari tradisi kulturalnya (Noorsena, 2001: 5). Hanya saja harus dipahami bahwa perubahan-perubahan wajah agama harus terjadi sebagai konsekuensi dari berubahnya pola pikir dan tata nilai masyarakat.

Misi setiap agama dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Jika ada nilai atau norma yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi secara universal maka nilai dan norma itu harus ditolak. Sekalipun itu disandarkan kepada ajaran kitab suci. Karena Tuhan Maha Adil, maka tidak mungkin di dalam kitab suci-Nya terkandung konsep-konsep yang mencerminkan ketidakadilan. Jika di dalam

pernyataan kitab suci mengandung unsur ketidak-adilan, maka hal itu harus segera diselesaikan dengan dua hal. *Pertama* membaca ulang kitab suci itu secara komprehensif. Kalau ternyata jelas dan tegas adanya ketidakadilan, maka unsur *kedua* perlu diperhatikan yakni boleh jadi yang keliru adalah persepsi manusia dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan (Umar, 2001: 1).

Sudah menjadi klasik dalam teori ilmu-ilmu sosial bahwa agama selain menjadi pemersatu sosial juga dapat menjadi unsur konflik. Namun seperti yang dikatakan Abdurrahman (1997: 298) dengan mengutip Schimmel, kedua unsur itu pada dasarnya seperti sisi-sisi mata uang yang sama dalam proses kohesi dan konsensus. Pergolakan agama menjadi pergolakan manusia dan unsur keputusan tiap penganut suatu agama serta tindakannya dari waktu ke waktu akan menentukan wujud agama tersebut dalam sejarah. Permasalahan yang tampil dalam dunia keagamaan hari ini adalah bahwa ia mengalami penciutan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Agama bukanlah apa yang dibayangkan, yang ada dalam realitas abstrak. Agama adalah penghayatan yang melahirkan keputusan dan tindakan.

Sejarah menunjukkan bahwa timbulnya sebuah agama adalah untuk melakukan *counter* terhadap *kekufuran* (keke-
rasan, penindasan dan perusakan) yang lazimnya melekat pada kelas (ekonomi, politik, maupun budaya) atas, artinya keberadaan agama menjadi *problem solving* terhadap

persoalan-persoalan kemanusiaan (Engineer, 2002: xviii). Namun sejarah juga membuktikan bahwa keberadaan agama terkadang menjadi *problem marker*, penghambat kemajuan, penyokong ketidakadilan sehingga dalam konteks ini, menjadi benar ungkapan sinis dari Karl Marx bahwa agama adalah candu masyarakat. Berbeda dengan Marx, Engineer (2002: xviii) melihat fenomena negatif agama muncul karena agama telah mengalami kemapanan (bandingkan Lowy, 1999; Steenbrink, 1987).

Dalam konteks Indonesia, memperbincangkan agama seperti lorong panjang tanpa akhir. Umat beragama sebagai warga negara dan Indonesia sebagai negara merupakan dua entitas yang berbeda namun tidak terpisah sama sekali. Umat beragama secara kelompok mempunyai sistem bertindak dan sistem sosial yang berbeda-beda tergantung kepada agama masing-masing. Pada sisi yang lain, Indonesia sebagai sebuah negara, memperlakukan agama-agama yang ada secara sama, pemerintah tidak mencampuri masalah intern agama, baik yang berkaitan dengan masalah penafsiran, pengalaman maupun kelembagaan dari masing-masing umat beragama. Maka konsekuensinya Indonesia tidak mengenal agama resmi negara (Effendi, 1998: 111). Dalam bingkai ini sering terjadi problematika; ada sebagian warga negara yang menghendaki agar bentuk negara disesuaikan dengan agamanya dan di sisi lain ada yang berusaha melakukan pemisahan antara agama dan negara.

Pluralitas agama, kepercayaan, adat istiadat, dan budaya, "memaksa" tiap-tiap komponen tersebut untuk saling bertemu, mempengaruhi, dan bahkan mengalahkan. Proses-proses tersebut tidak mustahil melahirkan suasana *chaos* dalam masyarakat. Maka penyikapan secara bijaksana terhadap pluralitas menjadi keniscayaan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Dalam konteks ini, agama secara teologis dapat memerankan fungsi kritik dan legitimasi (Effendi, 1998: 115).

Dalam pluralitas itulah sebenarnya harus dipikirkan secara jernih tentang konsep agama kita. Masih adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa agama lain adalah musuh. Permusuhan atas nama agama berkemungkinan dapat menjalar, sehingga menimbulkan perbuatan kontra-produktif. Menjadi tugas besar bagi golongan-golongan agama untuk: *pertama*, bagaimana mereka dengan bertolak dari imannya masing-masing memberikan sumbangan dan bekerja sama dengan golongan-golongan agama lain dalam melaksanakan tanggung jawab bersama untuk meletakkan landasan moral, etika, dan spritual bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. *Kedua*, bagaimanakah golongan-golongan beragama dengan bertolak dari imannya masing-masing dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara yang berasaskan Pancasila (Simatupang, dkk. 1996:

28). Kesalahan dalam memperlakukan agama tidak hanya berbahaya terhadap keberlangsungan negara tapi juga akan berpengaruh terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, agama harus memperjelas posisinya dalam menghadapi realitas sosial (Wahid, 1999: 159-169).

Konstruksi Keberagamaan

Menurut Joachim Wach (1996), ekspresi keberagamaan dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu: *pertama*, pemikiran keagamaan, yaitu ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk konsep-konsep atau ajaran yang bercorak teoritis dan intelektualistis. *Kedua*, perbuatan keagamaan (ritual) yaitu ekspresi keagamaan dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan sebagai bentuk implikasi praktis dari konsep-konsep atau pemikiran yang bersifat teoretis dan intelektualistis. *Ketiga*, persekutuan (organisasi) keagamaan, yaitu himpunan orang-orang yang mempunyai pemikiran dan perbuatan yang sama.

Ekspresi keberagamaan adalah respons terhadap apa yang dihayati sebagai realitas mutlak. Tanggapan tersebut akan termanifestasi dalam tiga tanggapan: *pertama*, dalam tanggapan terdapat beberapa tingkat kesadaran seperti pemahaman, konsepsi dan lain sebagainya. *Kedua*, tanggapan dipandang sebagai bagian dari perjumpaan. *Ketiga*, menghayati realitas tertinggi mengandung arti adanya hubungan

yang dinamis antara yang menghayati dan yang dihayati. (Wach, 1996: 45).

Dari pandangan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa ekspresi keberagamaan merupakan respon terhadap sesuatu yang diyakini sebagai realitas mutlak (Ultimate Reality). Dengan kata lain, persepsi individu atau kelompok terhadap Realitas Mutlak (Tuhan) akan mempengaruhi pola ekspresi keberagamaan. Persepsi terhadap realitas mutlak tersebut akan dimanifestasikan dalam tiga bentuk ekspresi keberagamaan: pemikiran, ritual dan persekutuan.

Persepsi terhadap Realitas Mutlak yang kemudian melahirkan beragam bentuk ekspresi keberagamaan tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti budaya, ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, terjadi hubungan dialektika antara manusia dan masyarakat. Manusia mampu berperan untuk mengubah struktur sosial dan, pada saat bersamaan, manusia dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakatnya (Berger, 1967: 3).

Hubungan manusia dengan masyarakat merupakan hubungan dialektis yang terdiri dari tiga momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi, manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Melalui eksternalisasi ini masyarakat menjadi realitas objektif bagi manusia, artinya masyarakat merupakan kenyataan yang

terpisah dari dan berhadapan dengan manusia. Proses ini disebut objektivasi. Selanjutnya masyarakat diserap kembali oleh manusia melalui proses internalisasi. Dengan kata lain, melalui eksternalisasi masyarakat menjadi kenyataan yang diciptakan oleh manusia, melalui objektivasi masyarakat menjadi kenyataan sendiri berhadapan dengan manusia, dan melalui internalisasi, manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakat.

Melalui proses konstruksi sosial tersebut, wajah agama dalam bentangan sejarah akan senantiasa berubah. Teori konstruksi memberikan penyadaran bahwa agama sebagai bagian sistem budaya akan bergerak secara dinamis tergantung kepada bagaimana individu atau kelompok memahaminya. Upaya untuk memahami pola keberagamaan individu atau kelompok, sedikitnya, ada tiga paradigma yang digunakan yaitu akulturatif, sinkretik, dan pribumisasi.

Abdurrahman Wahid: Sebuah Fenomena

Salah satu tokoh agama, budayawan, pemikir, dan tokoh prodemokrasi yang telah melakukan eksperimentasi keagamaan untuk mengejawantahkan nilai-nilai asasi agama dalam ranah sosial adalah Abdurrahman Wahid. Dia melakukan kritik terhadap status quo, baik yang berbentuk agama, kultur, maupun sistem sosial dan politik dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pemikiran keagamaan Abdurrahman Wahid menarik untuk dicermati. Beberapa kasus yang dapat dijadikan indikator keunikan pemikiran agama Abdurrahman Wahid di antaranya adalah penerimaan terhadap asas Pancasila ketika kelompok-kelompok Islam saat itu masih menentangnya, apel kesetiaan terhadap Pancasila sebagai wacana tandingan terhadap Orde Baru, Soeharto, pendirian BPR ketika para ulama masih silang pendapat tentang haramnya bunga bank, pembelaannya terhadap Monitor, penolakan masuk ICMI, pendirian Forum Demokrasi, menjadi presiden *World Conference for Religious Peace (WCRP)*, dan penggantian *salam* dengan selamat pagi dan lain sebagainya.

Sebagai tokoh NU, Abdurrahman Wahid dianggap mampu membawa NU menjadi kekuatan penyeimbang dan menjaga kemandirian dari kooptasi dan intervensi Negara (Thoha, 1997: 133-150; Fealy, 2010: 221-237). Menurut Douglas E. Ramege (1995: 45-74) dan Dhaniel Dhakidae (1997: 125-131), NU di bawah Abdurrahman Wahid sebagai *The Last Bastion of Civil Society* di Indonesia. Sebagai pemikir Islam, Fachry Ali menganggap Abdurrahman Wahid sebagai agamawan dan pemikir paling liberal di Indonesia yang belum tertandingi oleh Nurcholish Madjid sekalipun (Kosasih, 2000: 259). Menurut Soetjipto Wirosardjono, Abdurrahman Wahid mampu membangun jembatan komunikasi dengan seniman, budayawan, bahkan pendeta, media masa, dan penguasa (Kosasih, 2000: 256).

Ahmad Baso melihat, yang dirintis Abdurrahman Wahid dengan memperkenalkan tradisi sekularisasi dalam Islam, ide Pribumisasi Islam, yang mengapresiasi dialog antara tradisi lokal dengan ortodoksi Islam dan apresiasinya terhadap idiologi-idiologi barat yang transformatif dan mencerahkan merupakan contoh Islam liberal yang berusaha melakukan dialektika antara problem kemodernan, transformasi sosial dan tradisi lokal (Baso, 2000). Greg Barton menyebut Abdurrahman Wahid sebagai pemikir yang mampu menggabungkan dunia Islam yang tradisional dengan dunia modern bahkan dunia Barat (*Republika*, Minggu 10 Maret 2002: 4).

Buku ini akan mengkaji pemikiran keislaman Abdurrahman Wahid terutama yang berhubungan dengan kebudayaan, demokrasi, dan negara. Buku ini menjawab pertanyaan, bagaimana pemikiran-pemikiran keislaman Abdurrahman Wahid diperjuangkan dan bagaimana relevansinya terhadap kondisi keberagamaan di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa buku ini tidak akan membahas keterlibatan Abdurrahman Wahid dalam politik praktis. Tidak dibahasnya keterlibatan Abdurrahman Wahid dalam politik praktis bukan karena pembahasan itu tidak penting, tetapi agar buku ini lebih fokus terhadap pemikiran keagamaannya. Mungkin saja ada sedikit pembahasan yang berkait dengan politik tetapi itu hanya merupakan pelengkap untuk menjaga agar logika pembahasan tidak terputus.

Buku ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama membahas ragam fenomena keberagamaan yang terjadi dalam masyarakat khususnya Indonesia. Keberagamaan seseorang, bagaimanapun juga, merupakan bentuk respons kepada apa yang dipahami sebagai realitas mutlak. Dilanjutnya pada bagian kedua yang membahas tentang dinamika agama yang hidup dalam masyarakat, yaitu agama berdialektika dengan persoalan-persoalan sosial sehingga melahirkan beragam pemikiran dan sikap keberagamaan, seperti nilai asasi agama bagi manusia, respons terhadap demokrasi, dan bentuk hubungan agama dan negara.

Pada bagian tiga membahas tentang Abdurrahman Wahid. Bagian ini menampilkan sosok Abdurrahman Wahid mulai saat kelahirannya, tumbuh berkembangnya, dan sikap serta responsnya terhadap berbagai fenomena kemasyarakatan. Pemaparan ini penting untuk mengetahui akar historis pemikiran dan tindakannya.

Selanjutnya, bagian keempat membahas tentang pemikiran keagamaan Abdurrahman Wahid. Ada tiga hal yang didiskusikan, yaitu tentang sosok Abdurrahman Wahid dan aktivitas sosialnya; dimensi-dimensi pemikiran keagamaan Abdurrahman Wahid, yang meliputi kebudayaan, demokrasi dan negara; dan tentang posisi pemikiran keagamaan dan perjuangan Abdurrahman Wahid. Pembahasan tentang bagaimana relevansi pemikiran keagamaan Abdurrahman Wahid dalam konteks Indonesia menjadi penutup dari buku ini.

Bagian Kedua

EKSISTENSI AGAMA DALAM REALITAS SOSIAL

Kata agama cukup mudah diucapkan. Namun, kata tersebut akan menjadi sulit jika diawali kata tanya "apa". Penjelasan tentang agama tidak semata-mata berkaitan dengan aspek akar kata, tetapi juga kultur, struktur pengetahuan, dan politik. Dalam masyarakat Jawa misalnya, agama diturunkan dari kata *ageman* yang berarti pakaian. Dengan meletakkan agama sebagai *ageman*, maka berganti-ganti *ageman* (agama) merupakan hal yang wajar dan lumrah: bukan sesuatu yang wah dan harus disikapi secara serius. Lain lagi ketika melihat agama dalam wilayah sosial dan politik. Agama akan bermetamorfosis menjadi entitas yang tidak saja menentramkan, tetapi juga menegangkan.

Dari agama kemudian muncul keberagamaan, yaitu agama yang diekspresikan atau agama yang diejawantahkan